

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo** Tahun **2025** dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

LAKIP ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun **2025**, serta sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, capaian kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja yang telah dilaksanakan.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang, sekaligus sebagai sarana peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LAKIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Gorontalo, 2 Februari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Gorontalo

MUH. ALI IMRAN BALI, S.IP, M.Si
NIP. 19660406 198603 1008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi dalam mendukung terwujudnya stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban umum, serta penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Perjanjian Kinerja. Sasaran strategis yang ditetapkan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan partai politik, peningkatan kewaspadaan dini dan deteksi konflik sosial, serta pemeliharaan stabilitas politik daerah

Secara umum, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang **Sangat baik**, dengan sebagian besar indikator kinerja utama mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan, pemantauan dinamika politik daerah, serta koordinasi kewaspadaan dini berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kondusivitas wilayah.

Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2025 mencapai **93,23%** dari total anggaran yang dialokasikan. Penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, dinamika sosial politik yang cepat berubah, serta meningkatnya tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Namun demikian, berbagai upaya perbaikan dan inovasi terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi peran masyarakat.

Ke depan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan guna mendukung terciptanya stabilitas politik, ketahanan nasional, dan persatuan bangsa di daerah, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Tugas dan Fungsi	5
D. Isu Strategis	6
E. Keadaan Pegawai	6
F. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	8
G. Keuangan	9
H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Startegis	11
B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
1. Tujuan.....	13
2. Sasaran	14
C. Strategi dan Arah Kebijakan	14
D. Indikator Kinerja Utama	16
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
F. Rencana Anggaran Tahun 2025	20
G. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	20
H. Instrumen Pendukung.....	21
1. Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	22
2. Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial	22
3. Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	22
4. Sistem Informasi E-Rekom	22
5. Sistem Informasi Perencanaan	22

6. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	22
7. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi E-Sakib	22
8. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi SIMPD	23
9. Sistem Informasi Metadata Sektor	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1 Pengukuran Kinerja Organisasi	24
3.1.2 Analisis Pencapaian Kinerja	25
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025	25
2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun yang Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	40
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir	41
4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	44
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	45
6. Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mendukung Keberhasilan dan peningkatan kinerja serta solusi dalam menangani kegagalan atau penurunankinerja	51
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	53
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	55
3.2 Realisasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Rencana Tindak Lanjut	60

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aset / Modal	8
Tabel 1.2 Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	14
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2024	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025	18
Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo	21
Tabel 2.6 Sistem Informasi Penunjang tugas dan Fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	22
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025	24
Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025	26
Tabel 3.3 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Wasbang melalui Upacara dan Pembentukan Paskibraka	36
Tabel 3.4 Jumlah Ormas yang terdaftar Tahun 2025	39
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu	40
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir	42
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra	44
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	53
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Tahun 2025	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo	4
Gambar 1.2 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	7
Gambar 1.3 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan	7
Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.5 Grafik Profil Tenaga Penunjang Kegiatan Berdasarkan Pendidikan.	8
Gambar 2.1 Website Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	22
Gambar 2.2 Website Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial	21
Gambar 2.3 Website Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	22
Gambar 2.4 Sistem Informasi e-rekom	22
Gambar 2.5 Website Sistem Informasi Perencanaan.....	22
Gambar 2.6 Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo	22
Gambar 2.7 Aplikasi E-Sakip Pemda Provinsi Gorontalo	22
Gambar 2.8 Aplikasi SIMPD Pemda Provinsi Gorontalo	23
Gambar 2.9 Website Meta Data Sektor	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta memperhatikan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, Laporan akuntabilitas ini terdiri dari dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan lainnya. Sedangkan dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pembagian urusan ini sudah jelas bahwa perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden di daerah adalah Gubernur yang bertugas mengurus Pemerintahan Daerah. Pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa Urusan Pemerintahan meliputi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum ini Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat di daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, untuk urusan pemerintahan umum sebagaimana yang tertuang diatas jelas bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah Gubernur dibantu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penetapan kelembagaan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, dalam Pasal 2 bahwa Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan. Hal ini pula ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 122 bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang berbentuk badan dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat khusus dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana yang diatur Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

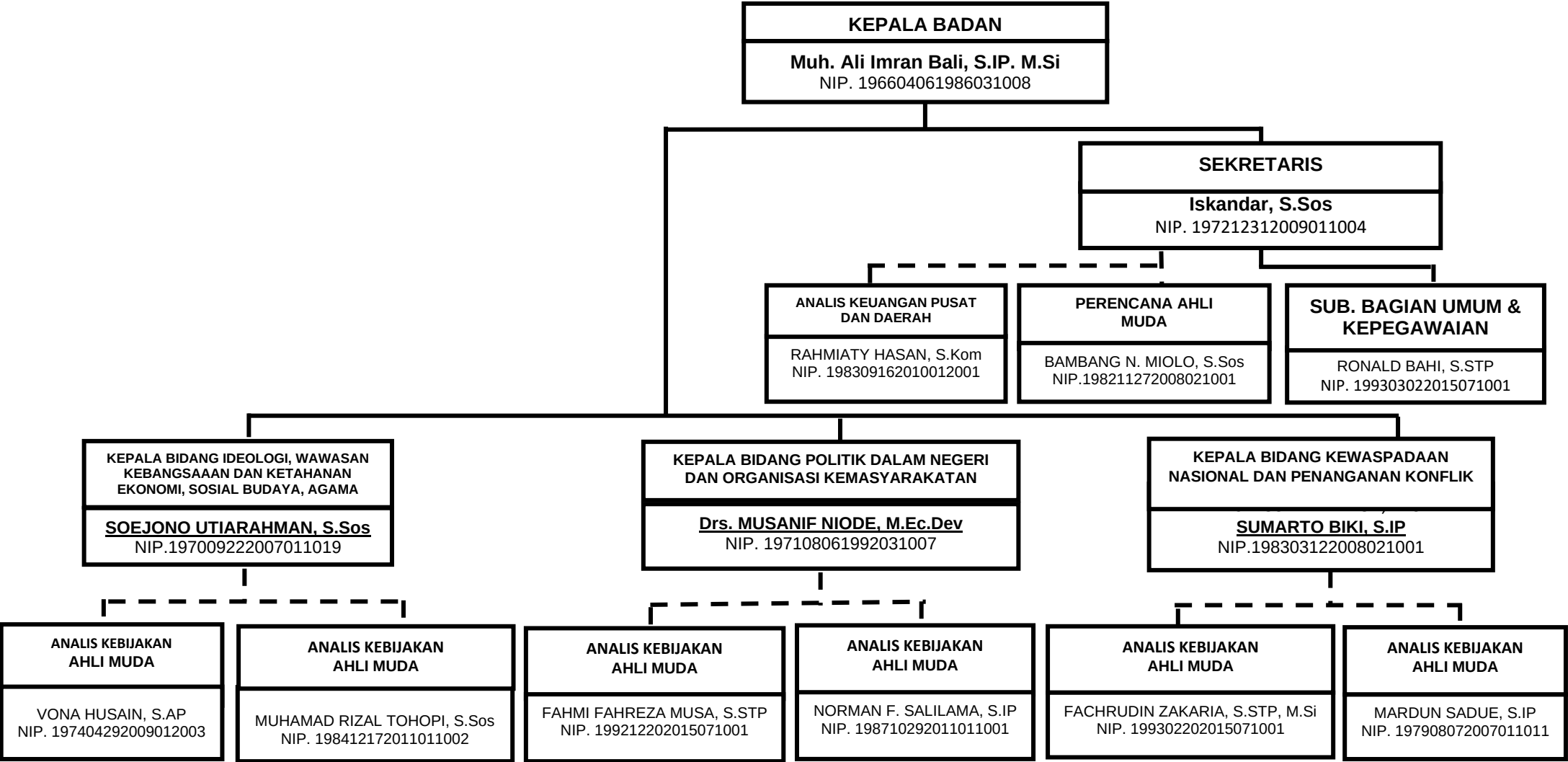
B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tersebut diatas, struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO**
(Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022)



C. Tugas Dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 memiliki Tugas Pokok Dan Fungsi sebagai berikut :

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Membantu Gubernur Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- 6) pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik;

7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Untuk melaksanakan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

D. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo yang berkaitan langsung dengan situasi kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi keamanan yang terus mengalami dinamika menuntut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo lebih bekerja keras dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan tujuan dan sasaran sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Tahun 2025 situasi politik pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dan peralihan kepemimpinan berakhirnya masa kepemimpinan Penjabat Rudy Salahudin, MEM kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta stabilitas daerah terus menjadi perhatian.

Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap pesatnya arus globalisasi khususnya dibidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi yang berakkses negatif serta maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan minuman keras yang telah merambah hingga pelosok.

Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sangat penting dalam mendukung dan menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan yang demokratis, aman dan sukses tentunya dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah.

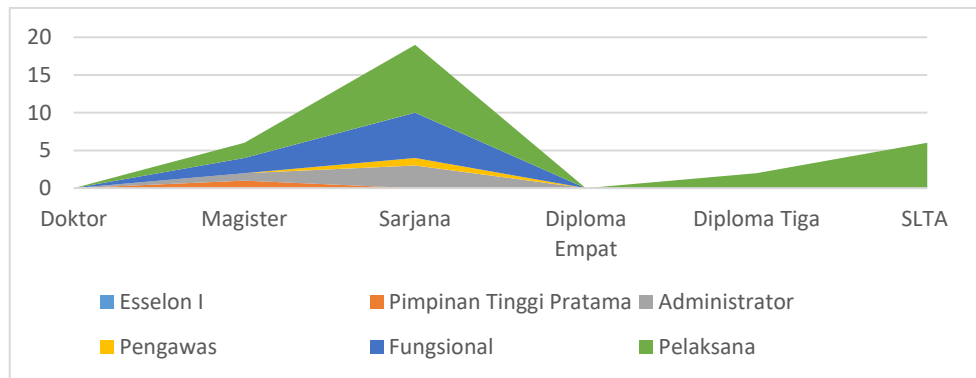
E. Keadaan Pegawai

Sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan formal

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan formal di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

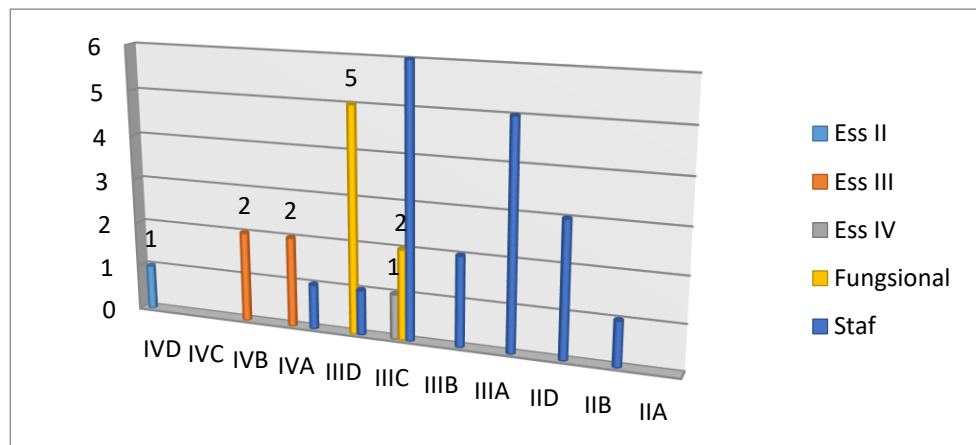
Gambar 1.2 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan



2. Keadaan pegawai menurut golongan

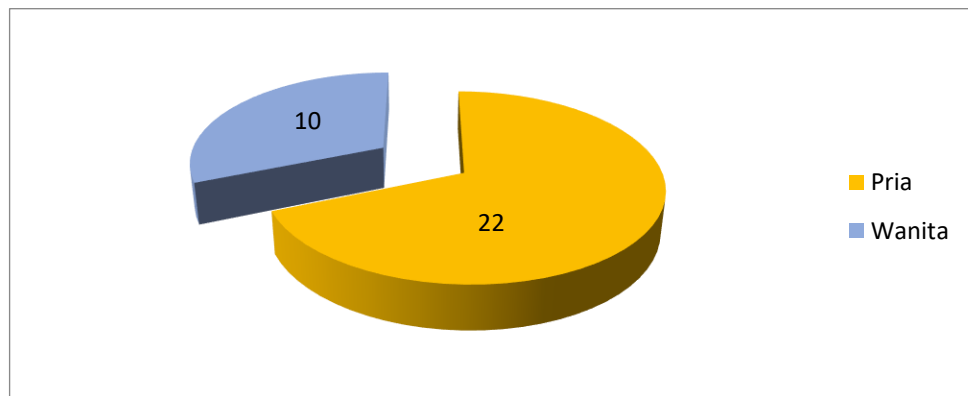
Keadaan pegawai menurut golongan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.3 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan



3. Keadaan Pegawai Menurut jenis kelamin

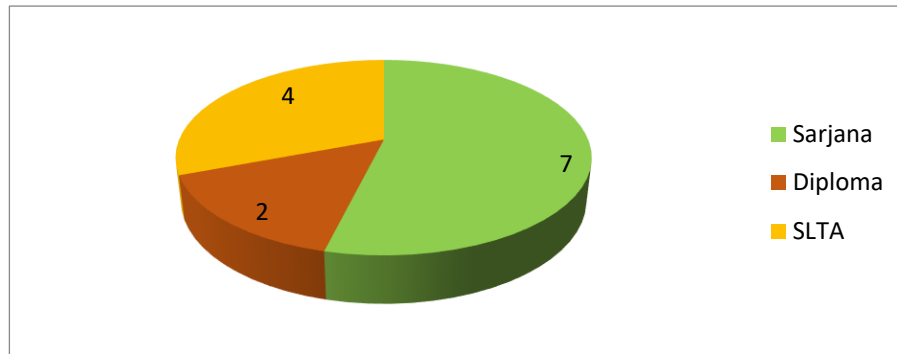
Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin



4. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Keadaan tenaga penunjang kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

Gambar 1.5 Grafik Profil Tenaga Penunjang Kegiatan Berdasarkan Pendidikan



F. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini dapat dilihat pada lampiran sarana dan prasarana.

Nilai aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sesuai daftar aset pada neraca pemerintah daerah provinsi Gorontalo per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Aset / Modal

No	Jenis>Nama Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	54.870.000,00
2	Peralatan dan Mesin	4.239.039.176,00
3	Gedung dan Bangunan	1.332.084.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.090.090,00
5	Aset Tetap Lainnya	-
Jumlah		5.679.083.266,00

G. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 berasal dari APBD Daerah Provinsi Gorontalo. Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi belanja daerah sebesar Rp 13.699.313.103,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Belanja SKPD Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)
5 1	BELANJA OPERASI	13.666.835.922,00
5 1 01	Belanja Pegawai	4.676.339.495,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.741.377.920,00
5 1 05	Belanja Hibah	2.249.118.507,00
5 2	BELANJA MODAL	32.477.181,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.477.181,00

diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja daerah yang berasal dari APBD didukung oleh 6 program, 9 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I (PENDAHULUAN)

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LAKIP

Bab II (PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA)

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN)

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

Bab IV (PENUTUP)

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diketahui bahwa Tahun 2025 adalah peralihan kepemimpinan Penjabat Gubernur Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, M.E.M kepada Pejabat definitif hasil pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2024 dan dilantik secara serentak pula oleh Presiden Prabowo Subianto bersama puluhan pasang Kepala Daerah Provinsi Se-Indonesia.

Sebagaimana hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2024 terpilih pasangan Dr. Ir. Gusnar Ismail, MM dan Dra. Hj. Idah Syaidah Rusli Habibie, M.H yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Dengan ditetapkannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta mewujudkan cita-cita dalam pembangunan daerah, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam mengimplementasikan RPJMD Provinsi Gorontalo, yang turunannya tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 sebagai pedoman dalam menentukan program-program dan kaitan dengan kegiatan-kegiatan dilakukan dalam lima tahunan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo merupakan manifestasi komitmen dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo periode 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Provinsi Gorontalo merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berisi Visi, Misi, Tujuan serta Prioritas Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta menjadi dasar penyusunan program dan anggaran. Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan visi :

“Gorontalo Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka misi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan;
- 2) Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima Provinsi termiskin di Indonesia;
- 3) Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 4) Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas;
- 5) Menjadikan “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan arahan visi dan misi di atas serta agenda pembangunan dengan mempertimbangkan arahan, maka dirumuskan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi Yang Berkelanjutan;
2. Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD, olehnya itu ditetapkan 12 sasaran dalam RPJMD 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan
2. Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah
3. Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air
4. Terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah
5. Menciptakan kondusifitas, stabilitas keamanan dan ketertiban daerah
6. Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif

7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan
8. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas
9. Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah
10. Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
11. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
12. Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian

Dari kelima misi tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo akan berkontribusi pada ketercapaian misi kesatu Gubernur Provinsi Gorontalo, yakni “Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselarasi pembangunan” yang dimaknai dalam bentuk dukungan Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dukungan atas ketercapaian misi tersebut akan dimanifestasikan melalui upaya pemenuhan tujuan kesatu Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, yakni “Peningkatan Ekonomi Yang Berkelanjutan”, khususnya pada sasaran kelima yakni, “Menciptakan kondusifitas, stabilitas keamanan dan ketertiban daerah” dengan indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya.

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo memiliki tujuan dalam mensukseskan program pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo periode 2025 - 2029. Adapun tujuan Renstra Badan kesbangpol Provinsi Gorontalo ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah ***“Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM”***.

2. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo kurun waktu tahun 2025 – 2029 menetapkan sasaran sebagai berikut : ***Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah;***

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Base line 2024	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
						2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM;		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		74,57	74,60	74,65	74,70	74,75	74,80	74,85
		Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Adapun strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai berikut:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemantapan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik dalam rangka Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila;
3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan menuju kesejahteraan masyarakat yang madani;
4. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional serta Fasilitasi dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Luar Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah dan penanganan konflik.
6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah;
7. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program, kegiatan dan subkegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dirumuskan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan semangat nasionalisme, karakter Bangsa, Bela Negera dan penguatan nilai - nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur;
2. Peningkatan Pendidikan Politik, Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam rangka pengembangan Etika dan Budaya Politik;
3. Meningkatkan peran Ormas dalam menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

4. Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dalam menciptakan harmonisasi dan moderasi beragama serta peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam Kewaspadaan Nasional di Daerah dan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial serta Kerjasama Intelijen;
6. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 362/5/XI/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 dan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi - Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
2	Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan}} \times 100\%$ Data Kinerja yang diperoleh melalui Fasilitas pelaksanaan kegiatan berupa Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penguatan Kerukunan Beragama, Monitoring Ketersediaan Sembako, Monitoring Pekat, Monitoring Perkembangan Politik, Pendidikan Politik dan Penguatan Wasbang melalui Upacara dan Pembentukan Paskibraka - Sumber data : Laporan Rutin Program

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan	Persentase Penguatan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas Lainnya	100%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	100%
		Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda	100%
		Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 5.689.553.962,-	APBD
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 940.500.000,-	APBD
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.730.044.849,-	APBD
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 915.281.992,-	APBD
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 71.000.000,-	APBD
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.068.200.000,-	APBD
T O T A L	Rp. 10.414.580.803,-	APBD

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	74,60
2	Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 6.299.367.143,-	APBD
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.272.580.500,-	APBD
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 3.219.850.468,-	APBD
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.197.734.492,-	APBD
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 37.581.000,-	APBD
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.672.199.500,-	APBD
T O T A L	Rp. 13.699.313.103,-	APBD

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani sebelumnya oleh Penjabat Gubernur Gorontalo pada Bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada Bulan Oktober 2025 dikarenakan adanya pergantian Kepala Daerah definitive yang sebelumnya jabatan Kepala Daerah diisi oleh Penjabat Gubernur kepada Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 serta perubahan rencana strategis perangkat daerah 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

F. Rencana Anggaran Tahun 2025

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp 10.414.580.803,- dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp 4.176.339.495,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp 4.180.934.537,-
- Belanja Hibah Rp 2.057.306.771,-

Sedangkan bertambahnya anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) menjadi Rp. 13.699.313.103,- dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp 4.676.339.495,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp 6.741.377.920,-
- Belanja Hibah Rp 2.249.118.507,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 32.477.181,-

G. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1.	Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	3.219.850.468	23,50	
	Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	4.180.095.492	30,51	
2.	Program pendukung	6.299.367.143	45,98	
	Jumlah	13.699.313.103	100	

H. Instrumen Pendukung

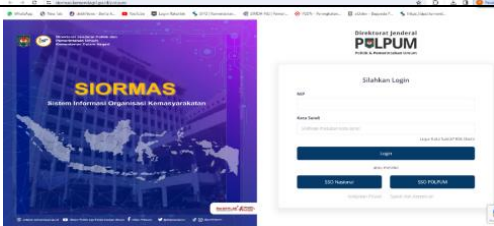
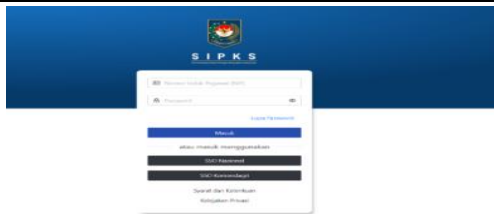
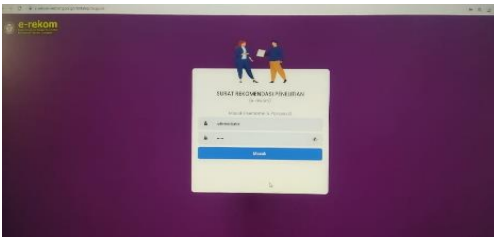
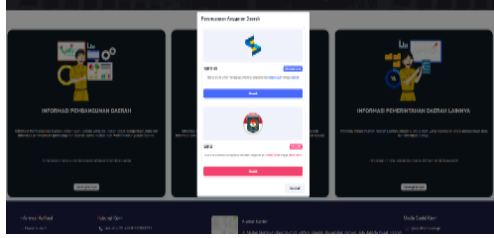
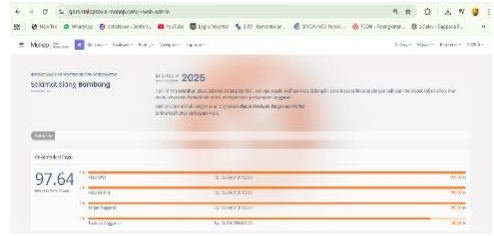
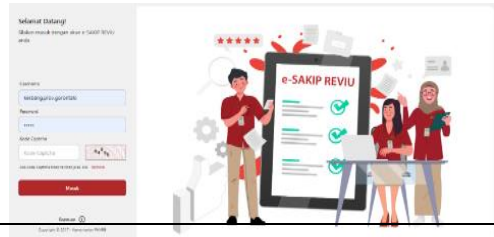
Dalam rangka mencapai target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan dan membangun sistem informasi.

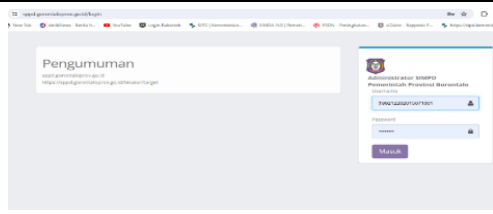
Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi.

Tabel 2.6 Sistem Informasi Penunjang Tugas dan Fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Uraian	Keterangan
1.	Sistem informasi organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai pendaftaran ormas melalui link : https://siormas.kemendagri.go.id/polpum .	
2.	Sistem informasi penanganan konflik sosial (SIPKS) merupakan alat yang sangat efektif dan efisien dalam memantau, memetakan dan menangani potensi konflik sosial dengan cepat. Adapun akses dari SIPKS melalui link: https://sipks.kemendagri.go.id/home/login	
3.	Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah ini merupakan informasi terkait perkembangan politik di daerah yaitu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di daerah, situasi politik di daerah dan dukungan pemerintah daerah pada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, adapun link yakni : https://sipantau.kemendagri.go.id/	
4.	Dalam rangka meningkatkan pelayanan pengurusan rekomendasi penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membuat inovasi sistem informasi e-rekom.	
5.	Sistem Informasi Perencanaan Sistem Informasi Perencanaan, SIPD (http://sipd.kemendagri.go.id)	
6.	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (E-Monev dengan alamat akses http://e-monep.gorontalooprov.go.id ,	
7.	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi E-Sakip dengan alamat akses http://esr.menpan.go.id	

8.	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi SIMPD) dengan alamat akses http://sppd.gorontaloprov.go.id	
9.	Sistem Informasi Meta Data Sektor berfungsi untuk memberikan informasi data daerah yang dimiliki Pemda Provinsi Gorontalo secara umum. Meta Data dengan alamat akses http://e-datasektor.gorontaloprov.go.id	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo bahwa Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengacu pada RPD/Renstra 2023–2026 yang digunakan selama masa transisi, dan juga menjawab PK yang telah disepakati dengan dasar RPJMD/Renstra periode terbaru 2025-2029, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 memuat analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Pengukuran Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sebelum Perubahan						
1.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan	Persentase Penguatan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas Lainnya	%	100	281,81	281,81

	meningkatkan nilai keagamaan					
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemantapan demokrasi	Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	100
		Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda	%	100	100	100
		Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula	%	100	100	100
Sesudah Perubahan						
1.	Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori	74,60	74,57	99,95
2.	Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	%	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi 100% sebanyak 4 target;
- 3) Sedangkan target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target;

3.1.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan ditahun 2025 melalui perjanjian kinerja tahun 2025, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria / Kode
Sebelum Perubahan							
1.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan	Persentase Penguatan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas Lainnya	%	100	281,81	281,81	Sangat Baik
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemantapan demokrasi	Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	100	Sangat Baik
		Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda	%	100	100	100	Sangat Baik
		Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula	%	100	100	100	Sangat Baik
Sesudah Perubahan							
3.	Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori	74,60	74,57	99,95	Sangat Baik
4.	Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	%	100	100	100	Sangat Baik

Pencapaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis sebagaimana pada tabel 3.2 terbagi dua yakni sebelum dan sesudah serta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan.

Kinerja peningkatan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan menjadi salah satu arah kebijakan yang diamanahkan berupa Pembangunan keagamaan untuk peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai dan ajaran agama, Budaya dan adat istiadat. Tentu hal ini menjadi peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif terhadap gangguan ancaman yang dapat memecah belah rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Olehnya itu kinerja sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Penguatan dan peran FKUB, FKDM dan Ormas.

Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menargetkan 11 Ormas yang diberikan penguatan dalam mendukung program kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan terealisasi sebesar 31 Ormas. Penguatan dan peningkatan kapasitas peran FKUB, FKDM dan Ormas ini melalui pemberian hibah dan pengawasan serta verifikasi ormas dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pementapan demokrasi

Pada sasaran ini dapat diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial

Capaian indikator ini adalah penyusunan penyusunan dokumen capaian rencana aksi penanganan konflik sosial yang dihimpun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo serta instansi vertikal, selanjutnya dievaluasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menargetkan 3 dokumen untuk penyusunan dokumen rencana aksi penanganan konflik sosial dan terealisasi 3 dokumen yang terbagi periode pelaporan yakni :

- Dokumen data dukung B.04 (Jan-April)
- Dokumen data dukung B.08 (Mei-Agustus)
- Dokumen data dukung B.12 (Sept-Des)

Sehingga untuk capaian ini sesuai target yang direncanakan telah dilaksanakan dan mencapai presentasi kinerja 100% dari penyusunan dokumen rencana aksi daerah tersebut.

b. Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda

Dalam proses penyelesaian konflik yang berkepanjangan maupun hanya sekedar isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, maka Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) berperan krusial dalam menjaga stabilitas daerah melalui sinergi antara Kepala Daerah, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya. Tugas utamanya meliputi deteksi dini gangguan keamanan, koordinasi penanganan konflik sosial, pengamanan kebijakan nasional, dan menjaga kondusivitas wilayah, yang semuanya berfungsi memastikan berjalannya pemerintahan dan pembangunan dengan aman.

Fasilitasi Forkopimda ini melalui rapat Forkopimda ditarget pelaksanaan 6 dokumen, sedangkan realisasi pelaksanaan 14 dokumen rapat Forkopimda dalam rangka menjaga stabilitas daerah.

c. Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula

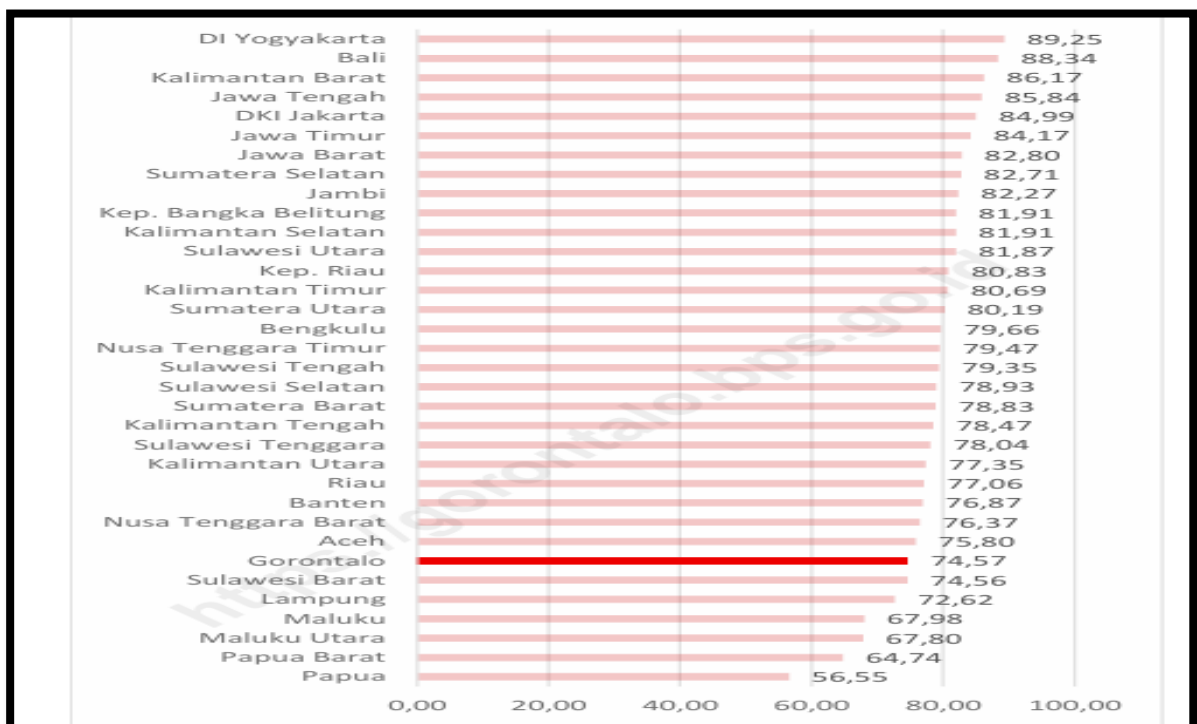
Dalam meningkatkan partisipasi politik kepada masyarakat diberikan pemahaman Pendidikan politik dalam membentuk kesadaran, meningkatkan partisipasi aktif, dan tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi. Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menargetkan 100% dari jumlah peserta 100 orang dan yang terealisasi 100 orang yang diberikan pemahaman tentang Pendidikan politik secara tatap muka.

1.3 Sasaran Strategis 3: Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah.

Sasaran pertama adalah Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah yang diukur melalui indikator kinerja **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**. Indeks Demokrasi Indonesia adalah angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek demokrasi diantaranya aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas Lembaga demokrasi. IDI hadir sebagai instrumen yang dapat mengukur tingkat perkembangan demokrasi Indonesia dan telah digunakan oleh Pemerintah pada RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024.

Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara Nasional dan masing-masing provinsi. Rentang nilai IDI adalah 0–100, semakin mendekati angka 100 maka tingkat pelaksanaan demokrasi semakin baik. Untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, nilai IDI dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi.

Untuk nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo tahun 2025 masih mengacu pada nilai IDI tahun 2024 yakni 74,57. Sedangkan nilai IDI tahun 2025 akan dirilis pada tahun 2026, berikut ini adalah hasil capaian nilai IDI secara Nasional sebagaimana gambar dibawah ini :



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Gambar 1 Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2024

IDI Provinsi Gorontalo tercatat berada di posisi/peringkat ke-28 di antara 34 provinsi di Indonesia dengan capaian sebesar 74,57 berada pada kategori sedang. Adapun metode pengumpulan data IDI merupakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dilakukan beberapa tahapan yakni :

- Dokumen data sekunder (K/L) dan Portal berita

Pengumpulan data/koding dokumen dilakukan pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, seperti Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Surat Edaran, Surat Keputusan DPRD dan dokumen-dokumen lainnya;

- Focus Group Discussion

FGD mempunyai peranan penting dalam upaya meminimalkan bias dari informasi yang dijangkau oleh koding koran, dokumen, data sekunder (K/L) & portal berita. Untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi yang baik maka peserta FGD mencakup berbagai pemangku kepentingan utama. Representasi unsur pemerintah, kelompok fraksi, kalangan pers, LSM, pemuda dan mahasiswa, tokoh politik, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat/agama, kelompok marginal dan wanita.

Pelaksanaan FGD IDI tahun 2024 difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sebagaimana amanat dari Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat nomor : 200.2.1/e-147/Polpum tanggal 22 Februari 2024 tentang Dukungan Badan Kesbangpol Dalam Penyelenggaraan Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Tingkat Provinsi, maka dilaksanakan FGD Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo Rabu 28 Mei 2025 di aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dibuka oleh Gubernur Gorontalo diwakili Plt. Asisten Pemerintahan Sukril Gobel, didampingi Kepala Badan Kesbangpol Muh. Imran Bali, S.IP, M.Si dan Kepala BPS Provinsi Gorontalo Dwi Alwi Astuti.



1.4 Sasaran Strategis 4: Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah

Sasaran keempat yakni terciptanya keamanan dan stabilitas daerah dan dapat diukur dengan indikator kinerja ***Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi***. Dalam mendukung indikator kinerja ini dapat diukur dari kinerja yang merupakan kegiatan strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut:

a. Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial

Untuk indikator ini dicapai melalui penyusunan dokumen capaian rencana aksi penanganan konflik sosial yang dihimpun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo serta instansi vertikal, selanjutnya dievaluasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagai berikut :

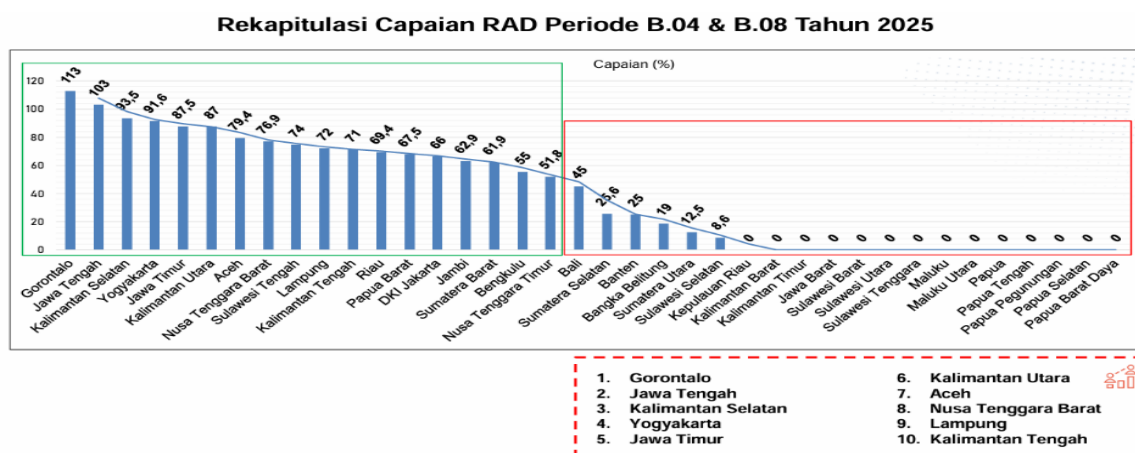
**RENCANA AKSI DAERAH (RAD) TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025**

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENCEGAHAN KONFLIK							
RA 01							
Kampanye Damai Gerakan Nasional kita Bersaudara	1. Kesbangpol 2. Dinas Pendidikan & Kebudayaan	1. Polda 2. Korem 133 NW 3. BAPPEDA 4. Dinas Pariwisata, 5. Dinas Pemuda & Olahraga 6. Dinas PMD, 7. Dinas Kominfo 8. FKDM 9. FKUB 10. Kemenag Kanwil Gorontalo 11. Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Sosialisasi/Rakor/ Parade/ Kampanye Damai Gerakan Nasional Kita Bersaudara	Tersusunnya Laporan Sosialisasi/Rakor/ Parade/ Kampanye Damai Gerakan Nasional kita Bersaudara sebanyak 3 (Tiga) kali	TARGET B04 Terlaksananya Sosialisasi/Rakor/ Parade/ Kampanye Damai Gerakan Nasional kita Bersaudara sebanyak 1 kali TARGET B08 Terlaksananya Sosialisasi/Rakor/ Parade/ Kampanye Damai Gerakan Nasional kita Bersaudara sebanyak 1 kali TARGET B12 Terlaksananya Sosialisasi/Rakor/ Parade/ Kampanye Damai Gerakan Nasional kita Bersaudara sebanyak 1 kali	100%	Kegiatan dapat berupa: - Rapat / Sosialisasi - Monev - Penerbitan Dokumen - Penyusunan Naskah - Kegiatan Lapangan
B. PENGHENTIAN KONFLIK							
RA 02							
Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial	1. Polda 2. Kesbangpol	1. Korem 133 NW 2. Binda, 3. Lanal, 4. Satradar 5. Satpol PP	Terlaksananya Sosialisasi/ Kegiatan terkait Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan konflik Sosial	Tersusunnya laporan Sosialisasi/ Kegiatan terkait Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan konflik Sosial sebanyak 3 (Tiga) kali	TARGET B04: Terlaksananya kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan konflik Sosial sebanyak 1 kali TARGET B08: Terlaksananya kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan konflik Sosial sebanyak 1 kali TARGET B12: Terlaksananya kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan konflik Sosial sebanyak 1 kali	100 %	Kegiatan dapat berupa: - Rapat / Sosialisasi - Monev - Penerbitan Dokumen - Penyusunan Naskah - Kegiatan Lapangan

C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK							
RA 03							
Program Strategis Lumbung Sosial dan/atau Pemberdayaan Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik Sosial di Daerah	1. Dinas Sosial 2. Dinas Pangan 3. Dinas Pertanian	1. Kesbangpol, 2. Dinas Koperindag 3. BPBD, 4. Satpol PP, 5. Dinas PMD Dukcapil, 6. Dinas P3A 7. POLDA 8. Korem 133 NW	Terlaksananya Kegiatan Penanganan dan Pemulihan pasca Konflik Sosial dalam rangka mendukung Program Strategis Lumbung Sosial dan/atau Pemberdayaan Pelopor Perdamaian	Terfasilitasinya penyelesaian dan pemulihan pasca Konflik Sosial dalam rangka mendukung Program Strategis Lumbung Sosial dan/atau Pemberdayaan Pelopor Perdamaian sebanyak 3 kali	TARGET B04 1. Tersedianya data Lumbung Sosial dan data Pelopor Perdamaian di Provinsi Gorontalo Dan/atau 2. Terfasilitasinya penyelesaian dan pemulihan pasca Konflik Sosial dalam rangka mendukung Program Strategis Lumbung Sosial dan/atau Pemberdayaan Pelopor Perdamaian sebanyak 1 kali TARGET B08 1. Tersedianya data Lumbung Sosial dan data Pelopor Perdamaian di Provinsi Gorontalo Dan/atau 2. Terfasilitasinya penyelesaian dan pemulihan pasca Konflik Sosial dalam rangka mendukung Program Strategis Lumbung Sosial dan/atau Pemberdayaan Pelopor Perdamaian sebanyak 1 kali	100%	Kegiatan dapat berupa: - Rapat / Sosialisasi - Monev - Penerbitan Dokumen - Penyusunan Naskah - Kegiatan Lapangan
					TARGET B12 1. Tersedianya data Lumbung Sosial dan data Pelopor Perdamaian di Provinsi Gorontalo Dan/atau 2. Terfasilitasinya penyelesaian dan pemulihan pasca Konflik Sosial dalam rangka mendukung Program Strategis Lumbung Sosial dan/atau Pemberdayaan Pelopor Perdamaian sebanyak 1 kali		
D. RENCANA AKSI LAINNYA							
RA 04							
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial se Kabupaten/Kota	1. Kesbangpol	1. Tim Terpadu PKS Provinsi Gorontalo, 2. Kesbangpol Kabupaten / Kota,	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi/Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial se- Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo sebanyak 3 kali	TARGET B04 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi/Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial se- Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo TARGET B08 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi/Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial se- Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo TARGET B12 Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi/Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial se- Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	100%	Kegiatan dapat berupa: - Rapat / Sosialisasi - Monev - Penerbitan Dokumen - Penyusunan Naskah - Kegiatan Lapangan

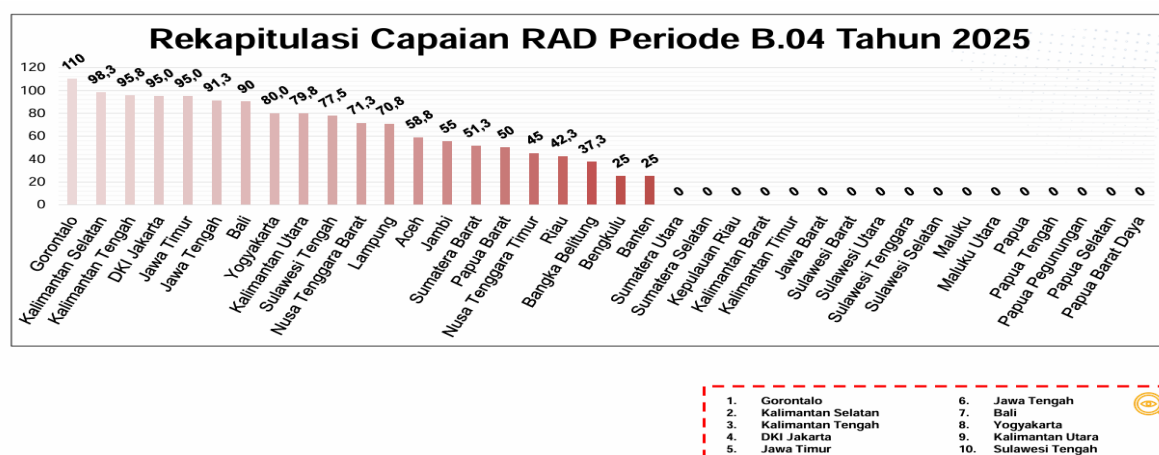
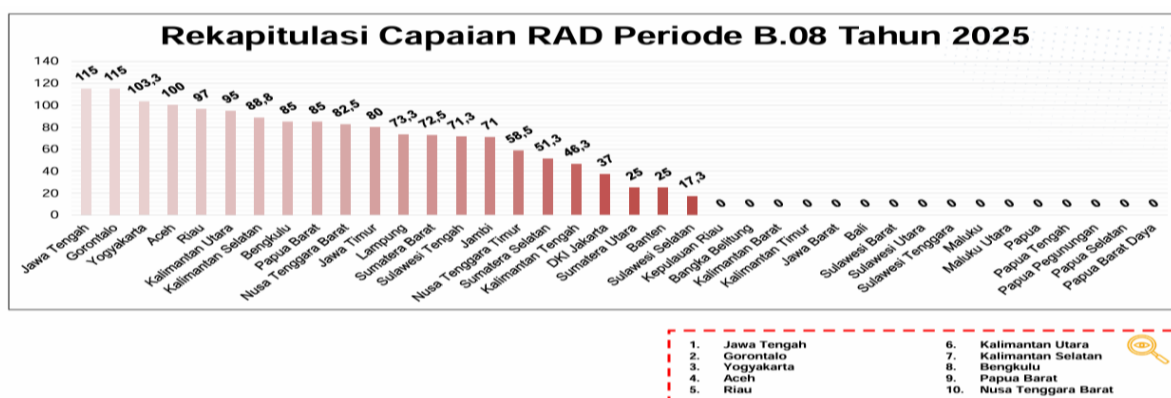

 BADAN KESBANGPOL
 PROVINSI GORONTALO
 RAN BALI, S.IP, M.Si
 Pembina Utama Madya, IV/d
 NIP. 19604061986031008

Pada pelaporan rekapitulasi capaian rencana aksi daerah B.04 dan B.08 Provinsi Gorontalo mencapai Peringkat 1 Nasional diangka 113% berdasarkan hasil penilaian Tim Penanganan Konflik Sosial Pusat Ditjen Polpum Kemendagri.



Sumber : Dit. Ekososbud, Ditjen Polpum Kemendagri, 2025

Dilihat dari rekapitulasi capaian B.04 hasilnya 110% menempati peringkat 1 Nasional, sedangkan untuk rekapitulasi capaian B.08 hasilnya 115% menempati peringkat 2 Nasional.



Sumber : Dit. Ekososbud, Ditjen Polpum Kemendagri, 2025

b. Koordinasi Forkopimda

Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antarunsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, perlu adanya forum koordinasi pimpinan di daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah. Untuk indikator kinerja ini ditargetkan 6 dokumen atas pelaksanaan rapat Forkopimda terkait langkah-langkah penanganan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di daerah dibahas melalui Rapat Forkopimda untuk mendapatkan kesimpulan solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di Daerah. Rapat Forkopimda ini terlaksana dalam kurun waktu satu tahun anggaran menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yakni :

- Penyelesaian sisa tali asih penambang oleh Pani Gold Project Marisa
- Pembentukan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di Wil. Provinsi Gorontalo
- Penanganan Pertambangan Ilegal (PETI) Diwilayah Prov. Gorontalo



c. Partisipasi politik melalui pemahaman Pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih pemula

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Politik kepada masyarakat dan pemilih pemula. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang berfokus pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Tujuan utama pendidikan politik adalah untuk membantu individu menjadi warga negara yang lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, dan cara-cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik.

Pendidikan politik meliputi beberapa topik utama seperti sistem politik, konstitusi, hak asasi manusia, pemilihan umum, partai politik, kebijakan publik, dan partisipasi politik dengan menghadirkan narasumber dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan Pendidikan Politik bertempat di Roemah Marly Restaurant, Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo Selasa, 18 November 2025.



d. Penguatan Wasbang Melalui Upacara dan Pembentukan Paskibraka

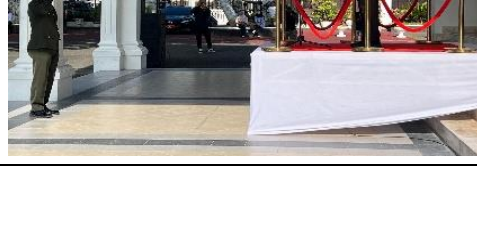
Penguatan wawasan kebangsaan adalah upaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kolektif mengenai jati diri bangsa, yang berakar pada empat pilar negara: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksanaan penguatan ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan secara tatap muka berlangsung di Gedung Lemhanas RI Jakarta dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.



Selain itu pula penguatan ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan melalui Upacara dan Pembentukan Paskibraka adalah strategi efektif untuk membentuk karakter pemuda Indonesia yang nasionalis, berintegritas, dan berjiwa Pancasila, dengan menjadikan momen pengibaran bendera sebagai sarana pembinaan kepemimpinan, disiplin, kerja sama, serta penanaman nilai-nilai luhur bangsa seperti cinta tanah air, persatuan, dan tanggung jawab, menjadikan Paskibraka sebagai kader pemimpin masa depan bangsa. Adapun pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi :

Tabel 3.3 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Wasbang melalui Upacara dan Pembentukan Paskibraka

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.	Kirab Bendera Pusaka dan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Patriotik 23 Januari, kegiatan ini berupa kegiatan pawai atau arak-arakan yang dilakukan secara teratur yang melibatkan barisan Ormas, Organisasi Kepemudaan benda pusaka dengan makna simbolis untuk memperingati peristiwa penting yakni Hari Patriotik 23 Januari.	

	Diawali dari Kantor Badan Kesbangpol Provinsi rombongan menuju Kab. Pohuwato, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Gorontalo, Kab Bone Bolango dan terakhir di Kota Gorontalo	
2.	Upacara memperingati Hari Patriotik 23 Januari 1942 yang ke-83 Tahun 2025 Tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung Halaman Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo sekaligus Ziarah Makan Pahlawan Nasional Nani Wartabone.	 
3.	Upacara Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya, sebagai momentum penting mengenang pidato Soekarno di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang menguraikan konsep dasar negara Pancasila, dan ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak 2016 melalui Keppres No. 24 Tahun 2016. Peringatan hari lahir Pancasila tingkat Provinsi Gorontalo dilaksanakan Minggu, 1 Juni 2025 bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo dan menjadi Inspektur Upacara yakni Gubernur Gorontalo	 
4.	Renungan Suci Hari Proklamasi adalah acara khidmat mengenang jasa pahlawan pada malam menjelang 17 Agustus, tepat pukul 00.00, di Taman Makam Pahlawan, berisi doa, hening cipta, dan pembacaan naskah untuk memperkuat semangat nasionalisme dan komitmen menjaga kemerdekaan, mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah amanah perjuangan. Acara ini melibatkan pemimpin negara dan daerah, serta menjadi simbol persatuan dan pengingat akan pengorbanan demi NKRI	 
5.	Pelaksanaan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila merupakan simbol ketangguhan ideologi Pancasila yang teruji dan tetap kokoh menghadapi upaya penggantian dasar negara, terutama setelah peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965, diperingati setiap 1 Oktober sebagai pengingat sejarah, penghormatan pahlawan yang gugur, dan komitmen menjaga Pancasila sebagai perekat bangsa yang mampu merangkul perbedaan serta menjadi	

	pedoman moral bangsa Indonesia. Ini bukan kesaktian mistis, melainkan kekuatan nilai-nilainya yang relevan dan menyatukan. Memperingati hari Kesatuan Pancasila dilaksanakan Rabu, 1 Oktober 2025 bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo.	
6.	Peringatan Hari Pahlawan yakni pada 10 November untuk mengenang para pahlawan yang gugur dimedan pertempuran melawan penjajah, dan kini menjadi momentum untuk meneladani semangat juang pahlawan dalam membangun bangsa melalui kerja keras, inovasi, dan pengabdian sesuai bidang masing-masing, bukan hanya dengan angkat senjata. Melalui peringatan hari pahlawan ini untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan pada generasi muda. Peringatan Hari Pahlawan Senin, 10 November 2025 bertempat di Halaman Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo	 
7.	Pembentukan Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) merupakan program kaderisasi calon pemimpin berkarakter Pancasila, dengan proses seleksi ketat dari administrasi, kesehatan, PBB, hingga kepribadian, di bawah naungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo untuk membentuk pemuda tangguh, mandiri, dan nasionalis. Tahun 2025 telah terbentuk Paskibraka berjumlah 25 orang yang diberikan pelatihan dan penguatan ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	 

e. Penguatan dan Verifikasi serta Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Penguatan, verifikasi, dan pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berfokus pada stabilitas politik dalam negeri, wawasan kebangsaan, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Kesbangpol bertugas memverifikasi, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan politik, pemeliharaan ketahanan ideologi Pancasila, kerukunan umat beragama, dan pemetaan potensi konflik sosial, khususnya saat Pilkada

Kesbangpol juga berperan sebagai fasilitator dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan administratif dan evaluatif. Dalam

mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis ini juga dilaksanakan kegiatan verifikasi dan pengawasan ormas dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan monitoring keberadaan ormas. Daftar Ormas yang terdaftar di Tabel 3.4 Jumlah Ormas yang terdaftar Tahun 2025

No	Bentuk Ormas	Status SKT/AHU	Jumlah
1	Berbadan Hukum - Perkumpulan - Yayasan	Aktif Aktif	108 26
2	Tidak Berbadan Hukum	Aktif	50
Jumlah			184

Sumber : Bid. Poldagri dan Ormas

Berdasarkan data diatas jumlah Ormas yang terdaftar 184, memiliki Badan Hukum Aktif 108 terdiri dari perkumpulan 108 dan Yayasan 26, sedangkan tidak berbadan hukum aktif 50 ormas. Keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun yang Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu, dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
Sebelum Perubahan								
Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan	Persentase Penguatan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas Lainnya	%	100	100	372,72	281,81	372,72	281,81
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemantapan demokrasi	Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula	%	100	100	100	100	100	100
Sesudah Perubahan								
Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori	71	74,60	74,57	-	105,02	-
Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100

Dari hasil tabel di atas dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dibandingkan tahun lalu berbeda dikarenakan hasil capaian tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.

Terdapat 1 indikator kinerja yang mengalami peningkatan, 1 indikator kinerja mengalami penurunan dan 4 indikator mencapai target yakni:

- a. Indikator Persentase Penguatan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas Lainnya ini berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat penurunan dari realisasi dengan tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan;
- b. Indikator persentase penyusunan pelaporan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial, persentase penanganan penyelesaian konflik sosial melalui rapat koordinasi forkopimda dan persentase partisipasi politik melalui pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih pemula pada pelaksanaannya telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan yakni 74,57, pada sasaran ini terus ditingkatkan dalam rangka perkembangan demokrasi di seluruh provinsi utamanya di Provinsi Gorontalo;
- d. Indikator persentase stabilitas keamanan, politik dan penguatan wasbang yang difasilitasi terlihat bahwa pada sasaran ini telah melaksanakan kegiatan strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik sehingga terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir.

Sementara itu perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sebelum Perubahan											
Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan	Persentase Penguatan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas Lainnya	%	100	100	100	354,54	372,72	281,81	354,54	372,72	281,81
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemantapan demokrasi	Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sesudah Perubahan											
Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori	70	71	74,60	79,71	74,57	-	113,87	105,02	-

Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan tahun terakhir sangat bervariasi seperti:

- Indikator kinerja persentase penguatan peran FKUB, FKDM, FPK, dan ormas lainnya ini terdapat perbedaan pada capaian kinerja tiap tahunnya, namun secara keseluruhan telah melebihi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam pemberdayaan dan pengawasan serta penguatan kelembagaan tentang peran dan fungsi ormas dalam pembangunan;
- Indikator persentase penyusunan pelaporan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial dan dalam hal ini terkait tentang penyusunan dokumen pelaporan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial, dari uraian tabel capaian kinerja diatas menunjukkan telah mencapai target dan merupakan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas daerah;
- Indikator persentase penanganan penyelesaian konflik sosial melalui rapat koordinasi Forkopimda, hal ini menunjukkan dari kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Peran Forkopimda sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan dan memastikan daerah tetap kondusif, pertemuan sering diadakan untuk membahas isu terkini, seperti persiapan hari raya atau penanganan masalah keamanan;
- Indikator persentase partisipasi politik melalui pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih pemula merupakan langkah dalam pengembangan sistem demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Capaian kinerja ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ini terdapat perbedaan pada hasil realisasi dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo melalui pembinaan

ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, serta penguatan ketahanan sosial-budaya, yang semuanya mendukung pilar-pilar demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, termasuk dalam mengawal partisipasi politik dan penanganan konflik sosial agar tercipta stabilitas dan ruang demokrasi yang kondusif, meskipun efektivitasnya perlu terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

- Indikator kinerja persentase stabilitas keamanan, politik dan penguatan wasbang yang difasilitasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka memperkuat dan menjaga stabilitas daerah.

Pencapaian indikator kinerja diatas pada sasaran strategis 1 dan 2 sudah baik hanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dengan target jangka menengah 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Renstra	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria/ Kode	Ket
Sebelum Perubahan									
Meningkatkan pemajuan pelestarian kebudayaan agama; dan	Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan	Penguatan dan peran FKUB, FKDM dan Ormas		Ormas	100	100	100	Sangat Baik	
Meningkatnya Ketentraman dan	Meningkatnya Ketentraman	1	Capaian rencana aksi	%	81	87	107,40	Sangat Baik	

Ketertiban Masyarakat serta Pemantapan Demokrasi	dan Ketertiban Masyarakat serta Pemantapan Demokrasi		penanganan konflik sosial						
		2	Peningkatan Partisipasi Politik	%	100	100	100	Sangat Baik	
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM;	Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia		Kategori	74,60	74,57	105,02	Sangat Baik	

Dari tabel tersebut diatas bahwa capaian indikator kinerja yakni sangat baik dan telah terealisasi sesuai dengan target jangka menengah di tahun 2025. Namun untuk capaian diatas tentang indikator Indeks Demokrasi Indonesia masih menggunakan data capaian tahun 2024 dikarenakan belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Hal ini menjadi komitmen dari semua pihak yakni dimulai dari Pimpinan OPD, Pejabat Administrator maupun Pengawas/Fungsional hingga pada pelaksana dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ini dilihat dari 2 hal yakni melalui perjanjian kinerja sebelum perubahan terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan perjanjian kinerja sesudah perubahan 2 (dua) sasaran strategis pula, adapun hasilnya sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan dengan indikator persentase penguatan peran FKUB, FKDM, FPK, dan ormas lainnya

Untuk sasaran strategis ini dengan capaian indikator persentase penguatan peran FKUB, FKDM, FPK, dan ormas lainnya merupakan tanggung jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam rangka menjaga stabilitas daerah dari gesekan-gesekan Ormas yang bisa saja

memprovokasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membangun Negara maupun Daerah.

Faktor pendukung pencapaian kinerja dari sasaran strategis 1 yakni:

1. Memberikan penguatan kepada Ormas dalam rangka menjaga dan turut andil mengawal pemerintah dalam membangun daerah;
2. Memberikan bantuan hibah pada ormas - ormas berupa dana dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah pusat maupun daerah.

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemantapan demokrasi dengan indikator :

➤ **Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial**

Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial menjadi bagian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Olehnya itu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo akan menyusun rencana aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Pusat (TPKS). Pelaporan

rencana aksi penanganan konflik sosial ini nantinya akan dinilai dan kemudian diumumkan oleh TPKS tentang apa saja yang memenuhi kriteria penanganan konflik sosial.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Indikator : Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial

1. Masih kurangnya perhatian dari instansi terkait dalam pengumpulan data dukung;
2. Belum intensifnya koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi jajaran terkait dalam melakukan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi di Provinsi Gorontalo.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk Indikator : Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial

1. Upaya peningkatan rencana aksi penanganan konflik sosial melalui rapat koordinasi penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial dengan OPD dan instansi vertikal terkait dalam rangka pemenuhan data dukung rencana aksi penanganan konflik sosial;
2. Menjalinkan koordinasi yang baik secara intensif dengan Pemerintah Kab/Kota serta instansi terkait dalam melakukan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi di Provinsi Gorontalo.

➤ **Indikator : Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda**

Langkah-langkah penanganan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di daerah dibahas melalui Rapat Forkopimda untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di Daerah.

Faktor pendukung pencapaian kinerja Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda

- a. Menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Membahas permasalahan aktual di Provinsi Gorontalo yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah;

- c. Memberikan masukan kepada Gubernur dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara di Provinsi Gorontalo;
- d. Mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah Provinsi Gorontalo.

➤ **Indikator : *Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula***

Partisipasi politik melalui pemahaman Pendidikan Politik kepada masyarakat dan pemilih pemula dalam rangka meningkatkan partisipasi politik serta kesadaran politik dan meningkatkan kualitas demokrasi bagi masyarakat dan pemilih pemula agar tetap terjaga.

Faktor penghambat capaian kinerja indikator : Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula

- Kurangnya sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat dan pemilih pemula dalam rangka membentuk kesadaran masyarakat berdemokrasi.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk Indikator : Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula

Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat dan pemilih pemula dalam rangka membentuk masyarakat, terutama generasi muda, yang sadar dan aktif dalam proses demokrasi. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, proses pemilu, serta pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum.

c. Sasaran Strategis 1 : Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah

Untuk sasaran strategis ini dicapai melalui indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yakni tentang angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. IDI dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan data empiris yang dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat terutama untuk perencanaan

pembangunan demokrasi di daerah. Pengukuran IDI dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, namun tak lepas dari tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam mendukung pengukuran ini melalui dengan menjaga stabilitas keamanan, memfasilitasi pendidikan politik, memperkuat kerukunan antarwarga, serta memantau perkembangan politik daerah agar berjalan sesuai regulasi.

Hasil IDI tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo sehingganya masih menggunakan hasil IDI tahun 2024 yakni 74,57 turun dari tahun 2023 sebesar 5,14 dari hasil IDI 79,71.

Faktor pendukung pencapaian kinerja dari sasaran strategis yakni :

1. Meningkatkan Kualitas Regulasi Daerah

Menyusun Perda dan kebijakan daerah yang sejalan dengan demokrasi dan menghapus aturan diskriminatif.

3. Penguatan Lembaga Demokrasi Daerah

Memperkuat peran pemerintah daerah, DPRD, KPU, Bawaslu, partai politik, serta NGO dalam meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

4. Penguatan Kapasitas Aparat & Sosialisasi

Memperkuat ASN, aparat keamanan, dan perangkat desa agar berperilaku demokratis, menjamin kebebasan sipil, dan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik.

d. Sasaran Strategis 2 : Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah dengan indikator Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui pelaksanaan kegiatan strategis guna mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik, adapun kegiatan dimaksud sebagai berikut :

➤ **Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial**

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial adalah strategi terpadu yang disusun pemerintah daerah untuk mencegah, menghentikan, dan memulihkan pasca-konflik, didukung tim terpadu tingkat provinsi/kabupaten/kota. RAD mencakup pemetaan kerawanan, dialog, deteksi dini, dan penanganan darurat. RAD juga terbagi dalam pencegahan,

penghentian, dan pemulihan, serta pelaporan berkala ke Kementerian Dalam Negeri.

➤ **Koordinasi Forkopimda**

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah wadah sinergi pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, TNI) untuk membahas urusan pemerintahan umum, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung pembangunan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, forum ini krusial untuk koordinasi cepat antarinstansi, menangani konflik, dan menjaga kondusivitas wilayah.

➤ **Partisipasi politik melalui pemahaman Pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih pemula**

Pendidikan politik krusial untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemilih pemula, mengubah perilaku pemilih dari sekadar ikut-ikutan menjadi cerdas, kritis, dan rasional. Melalui pemahaman hak, kewajiban, dan dinamika politik, pemilih pemula dapat menghindari manipulasi informasi dan kontribusi positif dalam pemilu.

Penguatan Wasbang Melalui Upacara dan Pembentukan Paskibraka

Penguatan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) melalui upacara dan pembentukan Paskibraka berfokus pada penanaman nilai cinta tanah air, disiplin, dan karakter Pancasila bagi generasi muda. Melalui latihan fisik, mental, dan tata upacara, Paskibraka menanamkan patriotisme serta kepemimpinan sejak dini, sekaligus menyinkronkan standar nasional dalam merawat persatuan bangsa

Faktor pendukung pencapaian kinerja ini :

- **Pembinaan Disiplin & Karakter** melalui Pelatihan Paskibraka menekankan kedisiplinan, kerapian, dan tanggung jawab, yang membentuk karakter kuat pada generasi muda.;
- **Pemahaman Dasar (Pancasila)** : Adanya kesadaran untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam peraturan upacara.

Faktor kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja ini :

- **Kurangnya Pemahaman Makna:** Peserta didik, khususnya siswa, belum sepenuhnya memahami makna dan pentingnya upacara bendera, sehingga menganggapnya hanya formalitas
- **Rendahnya Kedisiplinan:** Banyak peserta yang tidak tertib, bercanda, atau menyepelekan upacara bendera.
- **Metode yang Membosankan:** Pelaksanaan yang monoton membuat peserta didik cepat bosan dan tidak khidmat, sejalan dengan temuan pada metode pengajaran PPKn yang membosankan.
- **Kurangnya Pengawasan:** Kurangnya pengawasan dari guru dan pihak sekolah menyebabkan peserta didik kurang serius dalam mengikuti upacara.
- **Perubahan Nilai Sosial:** Pergeseran nilai-nilai sosial dan kurangnya pemahaman sejarah/nilai kebangsaan menurunkan rasa nasionalisme
- **Kurangnya Keteladanan:** Minimnya contoh yang baik dari lingkungan sekolah dan orang tua dalam menghargai simbol negara

Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam memaknai dan merencanakan upacara bendera sebagai alat pendidikan karakter, bukan hanya kegiatan rutin semata.

Penguatan dan Verifikasi serta Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Penguatan, verifikasi, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Kesbangpol untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, transparansi, dan efektivitas partisipasi pembangunan. Verifikasi faktual meliputi pemeriksaan kepengurusan dan kesekretariatan, sementara pengawasan memantau aktivitas agar sesuai peraturan. Ormas diwajibkan terdaftar/berbadan hukum untuk legalitas, bantuan dana, dan kerja sama.

6. Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam mendukung Keberhasilan dan peningkatan kinerja serta solusi dalam menangani kegagalan atau penurunan kinerja

Guna mendukung dan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang pada pelaksanaannya dituang dalam rencana

strategis yang telah diuraikan diatas mencakup 2 (Dua) sasaran strategis pada renstra periode 2023 – 2026 dan 1 (satu) sasaran strategis pada renstra periode 2025 – 2029. Dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran bahwa terdapat keberhasilan yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa Program/Kegiatan yang ada dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2025.

Dalam mewujudkan realisasi dan capaian kinerja yang sesuai dengan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2025 dipengaruhi beberapa faktor, baik yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja :

- koordinasi yang semakin baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. kerjasama dan koordinasi baik sesama aparatur maupun dengan Instansi vertikal lainnya dan dengan beberapa Tim seperti: berkoordinasi dengan Tim Penanganan Konflik Sosial dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Gorontalo;
- Pada tahun 2025 capaian kinerja dinyatakan berhasil karena target kinerja 2025 dapat dicapai secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan;

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- kurang maksimalnya penggunaan anggaran untuk mendukung Program dan Kegiatan pada bidang;
- kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur dalam menunjang profesionalitas kinerja aparatur.

Upaya Pemecahan atau solusi dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
- Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk program termasuk peningkatan dana untuk pelatihan guna menunjang profesionalitas kinerja aparatur.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efesiensi
Sebelum Perubahan					
1.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan	Persentase Penguatan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas Lainnya	281,81	99,99	181,82
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemantapan demokrasi	Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	100	96,65	3,35
		Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda	100	85,05	14,95
		Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula	100	98,85	1,15
Sesudah Perubahan					
1.	Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	74,57	51,25	23,32
2.	Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	100	96,15	3,85

Dari tabel di atas terbagi dapat disampaikan bahwa sasaran strategis 1 (sebelum

perubahan) yaitu Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan persentase capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 281,81% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 181,82%. Sedangkan sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemantapan demokrasi diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja yakni :

- a. Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial. capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,35%;
- b. Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 14,95%;
- c. Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,15%;

Sedangkan capaian sasaran sesudah perubahan terdapat 2 (dua) sasaran strategis diantara :

- Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah dengan capaian tahun 2025 74,57 dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 23,32% (capaian tahun 2025 ini menggunakan hasil Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2024 dikarenakan tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo);
- Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah dengan capaian tahun 2025 100% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,85%;

Berdasarkan data pada uraian diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sepanjang tahun anggaran 2025 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian SANGAT BAIK yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata di atas 100%, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis sudah **Efisien** karena target kinerja telah tercapai dan terdapat efisiensi anggaran.

Selain itu terdapat keberhasilan yang memuaskan dari semua indikator yang ada, walaupun sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor yang belum

memadai, namun demikian dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga pelaksanaan rencana sasaran strategis dapat dilaksanakan.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang yaitu Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama. Adapun program– program yang telah diselenggarakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian program-program tersebut diatas dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
7. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas

- Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Pelaksanaan program dan kegiatan diatas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2025 sebesar **Rp.12.772.202.454,-** (93.23%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp 13.699.313.103,-**. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagai berikut :

1. APBD belanja operasi sebesar Rp 13.666.835.922,- (99,77%);
2. APBD belanja modal sebesar Rp 32.477.181,- (0,23%);

Realisasi anggaran yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja operasi APBD sebesar Rp 12.740.551.603,- (93.22%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program sebesar Rp 13.666.835.922,-.
2. Realisasi anggaran belanja modal APBD sebesar Rp 31.650.851,- (97.46%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 32.477.181,-.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Anggaran (Rp. 000,-)	Realisasi (Rp)	%
1.	Bidang Sekretariat	6.299.367.143	5.758.581.700	91,42
2.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	4.417.584.960	4.273.107.706	96,73
3.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1.672.199.500	1.449.123.922	86,66
4.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	1.310.161.500	1.291.389.126	98,57
Total		13.699.313.103	12.772.202.454	93,23

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2025.

Secara umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo telah berupaya merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja Tahun 2024 untuk tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dan khususnya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan uraian yang tertuang dalam bab III dapat dilihat bahwa, nilai capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sasaran strategis dan indikator kinerja, pencapaian target kinerjanya berada pada kategori sangat baik.

Dengan demikian, beberapa hal perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo kedepan diantaranya adalah :

1. Sasaran dalam meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan dengan indikator penguatan dan peran FKUB, FKDM dan Ormas hasil capaian dengan presentase 281,81 dalam rangka menjaga stabilitas daerah dari gesekan-gesekan Ormas yang bisa saja memprovokasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membangun Negara maupun Daerah. Hal ini kedepan masih menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam rangka menjaga stabilitas daerah agar situasi dalam keadaan aman dan kondusif.
2. Sasaran dalam meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemantapan demokrasi terbagi dalam 3 (tiga) indikator sebagai berikut:
 - Indikator Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial dalam rangka penyusunan dokumen rencana aksi penanganan yang terencana dan terukur untuk menjaga situasi tetap kondusif. Data dukung

yang akurat dan rencana aksi yang strategis sangatlah penting agar dapat memetakan potensi kerawanan konflik sejak dini, mengantisipasi serta mengambil langkah yang cepat dan tepat jika terjadi indikasi konflik serta menjaga situasi di Provinsi Gorontalo tetap aman dan damai;

- Indikator Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda yakni perang penting dalam mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah serta langkah-langkah penanganan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di daerah dibahas melalui Rapat Forkopimda untuk mendapatkan kesimpulan solusi dan kesepakatan terhadap situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di Daerah;
 - Indikator Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat demokrasi. Jadi pendidikan politik ini perlunya dilakukan dengan bersinambung agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap politik yang dimana terus saja berkembang. Hal demikian karena semakin berkembangnya juga permasalahan politik yang kompleks. Pada pendidikan politik ini tentunya melibatkan semua golongan muda maupun yang tua dan harus dipelajari sejak dini;
3. Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), untuk capaian kinerja masih menggunakan hasil IDI tahun 2024 dikarenakan belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi.
4. Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah merupakan bagian tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, hal ini didukung oleh kegiatan strategis yakni rencana aksi penanganan konflik sosial, koordinasi forkopimda, penguatan dan verifikasi ormas serta penguatan wasbang melalui upacara dan pembentukan paskibraka.

Berdasarkan simpulan tersebut diatas beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo untuk peningkatan kinerjanya ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan membangun sinergitas kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk optimalisasi pengembangan pendidikan politik, wawasan kebangsaan, stabilitas politik dan stabilitas keamanan daerah yang kondusif;
2. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparansi, efisiensi dalam upaya meningkatkan capaian riil seluruh program, kegiatan dan anggaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.

B. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- Menyelenggarakan rapat koordinasi internal untuk peningkatan kompetensi SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo;
- Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi;
- Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode;
- Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku;
- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terutama ke sekolah-sekolah melalui pendidikan, FGD, perlombaan maupun pengkaderan;
- Meningkatkan peran media sosial sebagai sarana diseminasi dan sosialisasi mengenai etika politik, ideologi wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan antar suku bangsa agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat luas, sehingga tercipta kondusifitas dan stabilitas daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2025 disusun. semoga dapat dijadikan pedoman untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dimasa yang akan datang.

Gorontalo, 2 Februari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Gorontalo



MUH. ALI IMRAN BALI, S.IP, M.Si
NIP. 19660606 198603 1 008



GUBERNUR GORONTALO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH.ALIIMRANBALI,S.IP,M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : RUDY SALAHUDDIN
Jabatan : PENJABATGUBERNURGORONTALO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo,07 Januari 2025

Pihak Kedua,

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Penjabat Gubernur

RUDY SALAHUDDIN
yang diterbitkan oleh BSrE.

Pihak Pertama,

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MUHAMAD ALI IMRAN BALI, S.I.P., M.Si.
yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan	Persentase Penguatan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas Lainnya	100%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	100%
		Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda	100%
		Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan PemilihPemula	100%

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 940.500.000,-	APBD
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.730.044.849,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 915.281.992,-	APBD
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 71.000.000,-	APBD
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.068.200.000,-	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 5.689.553.962,-	APBD
T O T A L		Rp. 10.414.580.803,-	APBD

Pj. GUBERNUR GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Penjabat Gubernur


RUDY SALAHUDDIN

yang diterbitkan oleh BSeE:

Gorontalo, 07 Januari 2025
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
PROVINSIGORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


MUHAMAD ALI IMRAN BALI, S.I.P., M.Si.

yang diterbitkan oleh BSeE:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



RENCANA AKSI KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET KINERJA TRIWULANAN				PROGRAM	ANGGARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan Meningkatkan kannilai keagamaan	Persentase Penguatan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas Lainnya	100%	25%	25%	25%	25%	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	915.281.992,00
2	MeningkatnyaKetentraman dan Ketertiban Masyarakat sertaPemantapanDemokrasi	Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	100%	25%	25%	25%	25%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.068.200.000,00
		Persentase Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda	100%	25%	25%	25%	25%	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik DanPengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.068.200.000,00
		Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula	100%		100%			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.730.044.849,00

Gorontalo,07 Januari 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL

PROVINSI GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



MUHAMAD ALI IMRAN BALI, S.I.P., M.Si.

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO

RANSTRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung Pembangunan dan Meningkatkan nilai keagamaan	Persentase Penguatan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas Lainnya.	$\frac{\text{Jumlah Ormas Yang Diberikan Penguatan}}{\text{Jumlah Ormas Yang Penguatan}} \times 100\%$	Data Kinerja yang diperoleh Dari ormas yang diberikan penguatan dalam mendukung Program kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan hasil Verifikasi keberadaan ormas Yang mendaftar. Kegiatan ini dilaksanakan Dalam waktu satu kali dan Verifikasi keberadaan ormas Setiap triwulan kurun waktu Satu tahun anggaran dalam rangka penguatan Kelembagaan ormas.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pemantapan Demokrasi	Persentase Penyusunan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial}} \times 100\%$	Data kinerja yang Dikumpulkan satu tahun per periode pelaporan yakni B.04, B.08 dan B.12, rencana aksi penanganan Konflik sosial ini dikumpul bersama oleh OPD dan Instansi Vertikal terkait. Selanjutnya data kinerja ini Diserahkan dan akan diolah Sekretariat Tim Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Kementerian Dalam Negeri RI. Sebelum pengumpulan data kinerja ini dilaksanakan Rapat Koordinasi bersama OPD danInstansi Vertikal terkait dalam rangka Penyampaian data rencana Aksi dari Sekretariat Tim Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Kementerian Dalam Negeri RI dan teknis penyusunan Pelaporan perperiode B.04 Januari–April, B.08 Mei–Agustus dan B.12 September–Desember.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, OPD dan Instansi Vertikal Terkait.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	Persentase Penanganan Penyelsaian Konflik Sosial Melalui Rapat Koordinasi Forkopimda	Jumlah Potensi Konflik Yang Bisa Diselesaikan <div><div></div></div> X100% Jumlah Konflik Yang Terdeteksi	Data Kinerja yang diperoleh melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap persoalan dan permasalahan yang berpotensi konflik didaerah. Langkah-langkah penanganan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi didaerah dibahas melalui Rapat Forkopimda untuk mendapatkan kesimpulan solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di Daerah. Rapat Forkopimda ini terlaksana sebanyak dua kali dalam satu bulan kurun waktu satu tahun anggaran menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Yang Terealisasi <div><div></div></div> X100% Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik	Data kinerja diperoleh dari pelaksanaan Pendidikan Politik dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pendidikan politik juga dalam rangka mendukung capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek demokrasi diantaranya aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Catatan:





GUBERNUR GORONTALO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. ALI IMRAN BALI, S.IP, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM

Jabatan : GUBERNUR GORONTALO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Dr. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM

Pihak Pertama,

MUH. ALI IMRAN BALI, S.IP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	74,60
2	Terciptanya keamanan dan stabilitas daerah	Persentase Stabilitas Keamanan, Politik dan Penguatan Wasbang Yang Difasilitasi	100%

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.272.580.500,-	APBD
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 3.219.850.468,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.197.734.492,-	APBD
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 37.581.000,-	APBD
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.672.199.500,-	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 6.299.367.143,-	APBD
T O T A L		Rp. 13.699.313.103,-	APBD

Gorontalo, Oktober 2025

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO,

GUBERNUR GORONTALO,

Dr. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, MM

MUH. ALI IMRAN BALI, S.IP, M.Si

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

ATAS LAPORAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, 13 Maret 2026
Plh. Kepala Biro Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK



RENGGAPRANATA ARADHEA, S.Kom

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

